

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DONALD TRUMP MENUTUP KANTOR PERWAKILAN PLO**

#### **A. Kebijakan Menutup Kantor PLO**

Perubahan kepemimpinan Presiden Trump menutup Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang telah aktif di Washington selama lebih dari dua decade, dilaporkan ditutup karena Otoritas Palestina menolak desakan Trump untuk masuk ke perundingan perdamaian yang dipimpin Amerika. Palestina mengklaim bahwa pemerintahan Trump bias terhadap mereka dan sepenuhnya mengadopsi posisi Israel, dan mengatakan mereka hanya akan bernegosiasi di bawah mediasi forum internasional yang lebih luas. Laporan itu juga menyatakan bahwa Bolton akan mengancam untuk mengambil tindakan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag jika bergerak maju dengan penyelidikan yang difokuskan pada tindakan Israel di Gaza. Bolton juga akan mengancam untuk melarang hakim ICC memasuki Amerika Serikat dan memberi sanksi dana mereka di lembaga keuangan Amerika, jika pengadilan bertindak terhadap Amerika Serikat (Nasional, 2018).

Tahun 2017, pemerintahan Trump mengancam akan menutup delegasi PLO, menyatakan bahwa undang-undang Amerika mengharuskan perundingan Israel-Palestina yang bermakna untuk memungkinkan delegasi melanjutkan operasinya. Namun, saat itu, negosiasi antara AS dan Otoritas Palestina masih berlangsung, sehingga pemerintah berhasil menunda keputusan tentang masalah tersebut.

Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penutupan misi diplomatik Palestina di Washington pada hari Senin 10 September 2018 Mereka juga mengancam sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (*ICC/International Criminal Court*) apabila

melakukan penyelidikan terhadap AS, Israel, atau sekutu lainnya. Langkah tersebut kemungkinan akan mengeraskan perlawanan Palestina terhadap peran AS sebagai pialang perdamaian (politik, 2018).

Pemerintah AS mengutip penolakan para pemimpin Palestina untuk memasuki pembicaraan damai dengan Israel sebagai alasan untuk menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (*PLO/Palestinian Liberation Organization*), meskipun AS belum mempresentasikan rencananya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Palestina menuduh pemerintah Amerika membongkar puluhan tahun keterlibatan AS dengan mereka.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mempercayai bahwa ia berusaha untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina adalah dengan membuat dua negara. Keseriusan Trump dalam mengusahakan perdamaian kedua negara adalah prioritas utamanya dalam semester pertama kepemimpinannya.

Pada 10 September 2018, administrasi Trump mengumumkan keputusan untuk menutup kantor Delegasi Umum Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang ada di Washington DC. Kantor tersebut adalah bukti usaha perdamaian yang dihasilkan dari Kesepakatan Oslo tahun 1993-1995 yang menguraikan rencana untuk pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menjelaskan bahwa keputusan penutupan PLO itu adalah usaha perdamaian yang lebih komprehensif. Sebaliknya pemimpin PLO mengecam rencana perdamaian Amerika, serta menolak untuk terlibat dengan pemerintah Amerika sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.

Saeb Erekat yang juga bekerja sebagai diplomat Palestina kemudian mengatakan bahwa ini tindakan penutupan PLO adalah bentuk penegasan dari kebijakan Administrasi Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina. Peningkatan agresi kebijakan Amerika Serikat ini

menjadi berbahaya bagi Palestina. Kebijakan administrasi ini kemudian dianggap dapat membubarkan sistem internasional untuk melindungi kejahatan dan serangan Israel terhadap tanah dan rakyat Palestina serta perdamaian di sekitarnya. Aaron David Miller dari Wilson Center mengatakan bahwa keputusan untuk menutup kantor PLO, bersama dengan keputusan administrasi Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem dari Tel Aviv akan merubah tatanan tradisional kedua negara yang solutif (Unknown, 2018).

Pada akhirnya proses pemindahan kedutaan besar amerika ke Yerusalem ini tetap dilaksanakan dan berhasil. Setelah pemindahan tersebut dilaksanakan disusul penutupan kantor PLO di Amerika. Proses penutupan kantor PLO di Amerika yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proses Penutupan PLO Amerika

No	Tanggal	Kegiatan Pemerintah
1.	2 Februari 2017	Gedung Putih mengeluarkan pernyataan tentang aktivitas permukiman Israel di Yerusalem
2.	15 Februari 2017	Perdana Menteri Israel bertemu dengan Trump
3.	3 Mei 2017	Presiden Otoritas Palestina bertemu dengan Trump
4.	1 Juni 2017	Trump membuat kedutaan besar di Tel Aviv
5.	20-21 Agustus 2017	Gedung Putih mengirim delegasi ke Israel
6.	6 Desember 2017	Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel

7.	16 Januari 2018	Departemen Luar Negeri membekukan \$ 65 juta untuk program bantuan Palestina
8.	23 Februari 2018	Departemen Luar Negeri mengumumkan tanggal pembukaan kedutaan di Yerusalem
9.	14 Mei 2018	Kedutaan Besar AS untuk Israel pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem dan diresimkan
10.	19 Juni 2018	Menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
11.	10 September 2018	Administrasi Trump mengumumkan penutupan kantor PLO <sup>119</sup>

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Trump ini kemudian mendukung satu belah pihak, yaitu Israel. Kecaman-kecaman yang dinyatakan dari banyak negara juga terbukti tidak menggetarkan niat Trump untuk mencabut keputusannya.

## **B. Kepentingan Amerika Serikat**

Timur Tengah merupakan wilayah geografis majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, mazhab dan ras, dan merupakan tempat lahir agama-agama Tuhan. Karakteristik ini, selain posisi geopolitik dan cadangan melimpah minyak dan gas, membuat wilayah Timur Tengah semakin urgen. Sejak awal abad ke-20, terutama pasca berakhirnya perang dunia pertama dan kedua, posisi geopolitik Timur Tengah sangat penting dalam kebijakan luar negeri Inggris, kemudian Amerika Serikat. Bahkan proses pembangunan negara-bangsa atau nation state di kawasan, penentuan perbatasan negara dan jaminan keamanan penguasa kawasan, dilakukan oleh kekuatan adidaya Barat. Tidak diragukan, pembentukan sebuah kawasan bernama Timur Tengah adalah hasil dari penjajahan Inggris dan Perancis.

Berdasarkan perjanjian Sykes Picot tahun 1914, dibentuk sebuah wilayah geografis baru sesuai peta penjajah. Tolak ukur pendirian negara-negara baru dan perbatasan di Timur Tengah, ditentukan sedemikian rupa sehingga bisa menjamin kepentingan imperialis. Artinya, Pembagian wilayah yang dipaksakan itu membuka kemungkinan pecahnya krisis-krisis abad ke-20 di Timur Tengah. Konflik Arab dengan rezim Zionis Israel, perang Irak dengan Kuwait, sengketa perbatasan Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab, konflik mazhab di Saudi dan Bahrain, serta krisis-krisis serupa lainnya, semua merupakan dampak geopolitik penjajah di kawasan Timur Tengah. Disintegrasi Palestina dan terbentuknya rezim penjajah Israel tahun 1948 dapat dianggap sebagai puncak intervensi kubu imperialis di Timur Tengah yang selamanya menjadi sumber ketegangan dan krisis di wilayah ini.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki pandangan lain dalam melihat potensi wilayah Timur Tengah dan kekhawatiran wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh kekuatan lawannya yakni Uni Soviet. Hal tersebut membuat Amerika Serikat semakin giat untuk memperkuat posisi Israel, sebagai negara yang memiliki faktor geopolitik yang sangat penting untuk membuat pengaruh di wilayah Timur Tengah. Salah satu sumbangsih besar Amerika Serikat adalah membantu perekonomian dan persenjataan Israel untuk melindungi keamanan Israel, dan untuk melawan negara-negara Timur Tengah lain dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Selanjutnya sejak kemenangan yang diperoleh Israel, Amerika Serikat berkontribusi penuh dalam pembangunan negara Israel, baik dari segi ekonomi, politik dan militer dengan merencanakan anggaran bantuan Amerika Serikat pada Israel.

Amerika Serikat juga menjembatani kesepakatan damai pertama yang tertuang dalam Perjanjian Camp David untuk membuat kesepakatan damai negaranegara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania yang bersinggungan langsung dengan Israel. Namun yang terjadi pada era

baru ,Proyek Timur Tengah Raya yang digagas Amerika awal tahun 2003 menggunakan dalih perang melawan terorisme dan penghancuran senjata kimia Saddam Hussein, dan dimulai dari perang Irak. Dalam strategi ini, jargon-jargon semacam demokrasi, kebebasan, pembangunan dan reformasi lantang disuarakan. Konflik etnis dan sengketa perbatasan yang diciptakan oleh perjanjian Sykes Picot, sejak lama sudah membuka peluang yang menjanjikan bagi intervensi kekuatan-kekuatan transregional.

Proyek Timur Tengah Raya pada kenyataannya adalah simbol upaya pembagian wilayah Timur Tengah. Dukungan Amerika atas konflik internal di sejumlah negara adalah salah satu opsinya. Amerika memanfaatkan setiap konflik internal di negara-negara Muslim dengan maksud untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Kajian transformasi negara-negara Muslim menunjukkan bahwa Barat sedang menjalankan strategi disintegrasi dan melemahkan negara-negara dunia. Menariknya, dalam proses menjadikan Timur Tengah seperti wilayah Balkan, Irak sebenarnya bukanlah target pertama. Sebelumnya di tahun 2011, proses disintegrasi Sudan terjadi akibat tekanan bertahun-tahun Amerika dan langkah pertama yang dilakukan Sudan Selatan adalah mengakui secara resmi negara Israel.

Libya dan Yaman merupakan target berikutnya dalam daftar domino upaya disintegrasi yang dilancarkan Amerika dan Israel di kawasan. Instabilitas kawasan Timur Tengah yang terjadi selama bertahun-tahun menjadi pertimbangan bagi Presiden Donald Trump untuk mulai mengimplementasikan kepentingan Amerika Serikat, salah satunya terkait pengakuan terhadap wilayah Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini disebabkan negara-negara di Timur Tengah mengenyampingkan persoalan konflik Palestina dengan Israel akibat dari domino disintegrasi yang dilakukan Amerika Serikat selama ini.

Disintegrasi yang dilakukan Amerika Serikat selama ini juga melumpuhkan kekuatan negara-negara yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat seperti Suriah, Irak, Yaman. Selain itu terjadi perubahan pasca terpilihnya Presiden Donald Trump terkait dengan hubungannya dengan negaranegara di Timur Tengah. Hal ini seperti hubungan Amerika Serikat dengan Israel yang semakin akrab dengan adanya keputusan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel, lalu hubungan Amerika Serikat dengan Turki yang berangsur membaik terkait pertemuan antara kedua Kepala Negara yakni Presiden Donald Trump dengan Presiden Erdogan di Washington untuk membahas terkait permasalahan Suriah. Selain itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab puas dengan pendekatan garis keras administrasi Trump terhadap Iran. Serta Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sissi, telah jelas mendukung kepemimpinan Donald Trump yang tidak menyinggung persoalan tentang hak asasi manusia (Post, 2017).

Terkait pergeseran peta geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tersebut, maka resiko yang dihadapi Presiden Donald Trump dalam mengimplementasikan Jerusalem Embassy Act juga terbatas pada pertentangan yang bersifat normatif dari berbagai negara, khususnya negara di kawasan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membendung keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang dilakukan Presiden Donald Trump. Melemahnya peran negara-negara Timur Tengah untuk melawan keputusan Presiden Donald Trump disebabkan masing-masing dari negara di Timur Tengah berfokus terhadap permasalahan yang terjadi di negaranya, dan dalam penyelesaian konflik yang terjadi cenderung bergantung kepada peran negara Amerika Serikat. Keputusan yang dilakukan Presiden Donald trump dalam hal ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan proyek pembuatan peta baru Timur Tengah yang pernah dibuat pada masa kepemimpinan Presiden George Bush. Karena dengan pemindahan kedutaan tersebut, sekaligus sebagai simbol pengakuan

terhadap legitimasi wilayah Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Hal ini tentu membuat Israel semakin kuat untuk menjadi negara induk Amerika Serikat yang dapat memberikan pengaruh besar pada iklim politik Timur Tengah, sekaligus melemahkan legitimasi Palestina di wilayah tersebut.

Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sendiri terikat dengan faktor ideologis yang sama dan juga kepentingan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Israel bagi Amerika Serikat adalah benteng untuk mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Hal ini karena kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat sangat besar di Timur Tengah. Adanya Israel yang berperan seperti negara duplikat Amerika Serikat di wilayah itu, tentu menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk mengembangkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Selain itu akan mempermudah Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingan di wilayah Timur Tengah, yang telah dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice pada masa pemerintahan Presiden George Bush Jr pada tahun 2006 di Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice bersama Perdana Menteri Israel Ehud Olmert saat itu memperkenalkan proyek “Timur Tengah Baru” yang diperkenalkan secara terbuka oleh Washington dan Tel Aviv dengan memulainya dari Lebanon, dengan harapan akan menciptakan tekanan dan instabilitas kawasan dan juga merubah nya menjadi era baru Timur Tengah yang sesuai kebutuhan dan tujuan geo-strategis Amerika Serikat dan Israel (Republika, 2015).

### **C. Penutup**

PLO (*Palestine Liberation Organization*) adalah organisasi gabungan dari beberapa faksi perjuangan rakyat Palestina. Organisasi ini didirikan tahun 1964 melalui Mukhtamar Umum Rakyat Palestina atau PNC pada 28 Mei –2 Juni 1964 di Kota Al-Quds (Yerusalem) dengan

dihadiri oleh 422 representasi Palestina. Pada muktamar itu, Ahmad al-Syaqiri terpilih sebagai Ketua PLO yang pertama 1964 s.d 1967, digantikan oleh Yahya Hamuda sampai tahun 1969, kemudian padatahun 1969 Ketua PLO dijabat oleh Yasser Arafat sampai ia meninggal pada tahun 2004.

Organisasi PLO yang didirikan sebagai entitas politik yang akan mewakili kepentingan Palestina yang berfungsi secara independen dari pemerintah Arab, awalnya sebuah organisasi yang bergerak dengan perjuangan fisik.<sup>103</sup> Namun pada masa kepemimpinan Yasser Arafat (1969-2004), PLO telah mengalami perubahan perjuangan ke diplomasi. Tepatnya pada tahun 1979 dalam sidang PNC; Arafat telah diberi mandat bebas untuk berunding secara terang-terangan dengan Israel. Dengan begitu, muncul beberapa perundingan antara lain Konferensi Madrid 1991 dan Perjanjian Oslo 1993. Dan kredibilitas Arafat di kalangan rakyat Palestina tergantung kepada kemampuannya

Konflik Palestina dengan Israel telah menjadi fokus Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Hal ini berkaitan dengan sejarah, pasca Inggris melepaskan tanggung jawab terhadap keputusannya membagi wilayah Palestina terhadap bangsa Arab dan Yahudi, dan campur tangan Amerika Serikat dalam membantu kaum Yahudi untuk meraih impiannya menegakkan negara Yahudi. Pada mulanya bantuan Amerika Serikat hanya terbatas pada bantuan moril, yakni dukungan Amerika Serikat terhadap perjanjian Balfour, yang menggambarkan keprihatinan Amerika terhadap nasib bangsa Yahudi. Namun demikian, seiring perkembangannya Amerika Serikat juga melihat keuntungan strategis dari wilayah Timur Tengah. Langkah besar yang diambil Amerika Serikat dalam mendukung bangsa Yahudi yakni dengan mengakui kedaulatan bangsa Yahudi dalam pembentukan negara Israel pada tahun 1948.

Dalam kurun waktu yang lama Amerika Serikat juga memberikan bantuan dari segi ekonomi, politik, dan militer untuk memperkuat posisi Israel di wilayah Timur Tengah. Jika ditinjau dari segi historis kedekatan Amerika Serikat dengan Israel telah berlangsung lama, hubungan historis itu membuat kepentingan kedua negara semakin berkaitan satu sama lain. Bagi pihak Amerika Serikat sendiri kepentingan Israel telah menjelma menjadi fokus politik luar negeri Amerika Serikat khususnya di wilayah Timur Tengah. Hal ini dipengaruhi adanya lobi Yahudi yang mendominasi kancah politik Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga memanfaatkan eksistensi Israel di Timur Tengah untuk mengukuhkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Selanjutnya, pada 10 September 2018, administrasi Trump mengumumkan keputusan untuk menutup kantor Delegasi Umum Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang ada di Washington DC. Kantor tersebut adalah bukti usaha perdamaian yang dihasilkan dari Kesepakatan Oslo tahun 1993-1995 yang menguraikan rencana untuk pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menjelaskan bahwa keputusan penutupan PLO itu adalah usaha perdamaian yang lebih komprehensif. Sebaliknya pemimpin PLO mengecam rencana perdamaian Amerika, serta menolak untuk terlibat dengan pemerintah Amerika sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.

Saeb Erekat yang juga bekerja sebagai diplomat Palestina kemudian mengatakan bahwa ini tindakan penutupan PLO adalah bentuk penegasan dari kebijakan Administrasi Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina. Peningkatan agresi kebijakan Amerika Serikat ini menjadi berbahaya bagi Palestina. Kebijakan administrasi ini kemudian dianggap dapat membubarkan sistem internasional untuk melindungi kejahatan dan serangan Israel terhadap tanah dan rakyat Palestina serta perdamaian di sekitarnya. Aaron David Miller dari Wilson Center mengatakan bahwa keputusan untuk menutup kantor PLO, bersama dengan keputusan

administrasi Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem dari Tel Aviv akan merubah tatanan tradisional kedua negara yang solutif.

Konflik Palestina dengan Israel telah menjadi fokus Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Hal ini berkaitan dengan sejarah, pasca Inggris melepaskan tanggung jawab terhadap keputusannya membagi wilayah Palestina terhadap bangsa Arab dan Yahudi, dan campur tangan Amerika Serikat dalam membantu kaum Yahudi untuk meraih impiannya menegakkan negara Yahudi. Pada mulanya bantuan Amerika Serikat hanya terbatas pada bantuan moril, yakni dukungan Amerika Serikat terhadap perjanjian Balfour, yang menggambarkan keprihatinan Amerika terhadap nasib bangsa Yahudi. Namun demikian, seiring perkembangannya Amerika Serikat juga melihat keuntungan strategis dari wilayah Timur Tengah. Langkah besar yang diambil Amerika Serikat dalam mendukung bangsa Yahudi yakni dengan mengakui kedaulatan bangsa Yahudi dalam pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Selanjutnya dalam kurun waktu yang lama Amerika Serikat juga memberikan bantuan dari segi ekonomi, politik, dan militer untuk memperkuat posisi Israel di wilayah Timur Tengah. Jika ditinjau dari segi historis kedekatan Amerika Serikat dengan Israel telah berlangsung lama, hubungan historis itu membuat kepentingan kedua negara semakin berkaitan satu sama lain.

Bagi pihak Amerika Serikat sendiri kepentingan Israel telah menjelma menjadi fokus politik luar negeri Amerika Serikat khususnya di wilayah Timur Tengah. Hal ini dipengaruhi adanya lobi Yahudi yang mendominasi kancah politik Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga memanfaatkan eksistensi Israel di Timur Tengah untuk mengukuhkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Kedekatan historis tersebut yang membuat Amerika Serikat mengimplementasikan dukungan terhadap Israel dengan membuat konstitusi yang mengatur wilayah Yerusalem sebagai

bagian dari Israel. Hal ini tertuang dalam Jerusalem Embassy Act tahun 1995, yang mengharuskan Amerika Serikat mengakui wilayah Yerusalem sebagai wilayah Israel. Konstitusi tersebut juga yang mendasari keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel, disertai dengan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Meskipun keputusan Donald Trump tentang Yerusalem bertolak belakang dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi bagi Donald Trump keputusan tersebut lebih menguntungkan bagi kepentingan Amerika Serikat maupun kepentingan Donald Trump sendiri. Melalui pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat hal tersebut pada akhirnya tetap terlaksana meskipun mendapat respon negatif dari negara lain. Kepentingan politik yang kuat untuk menjalankan konstitusi Amerika Serikat membuat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump berusaha merealisasikan keputusan pengakuan wilayah Yerusalem tersebut. Rasionalitas Presiden Donald Trump sebagai kepala negara yang lebih mendahulukan kepentingan negara juga menjadikan keputusan tersebut sebagai keputusan kolektif Amerika Serikat. Hal ini tentu semakin memperjelas sikap tegas Amerika Serikat yang sebenarnya dalam menangani konflik Palestina-Israel.

Keputusan penutupan Kantor PLO di Amerika juga berhubungan dengan rencana perdamaian yang akan dibuat oleh Presiden Donald Trump tentang rencana perdamaian *one state solution*. Meskipun pada dasarnya Amerika Serikat sampai saat ini masih menjadi tumpuan bagi negara Palestina dan Israel untuk merundingkan kesepakatan damai, namun agaknya dengan adanya keputusan tersebut kesepakatan damai akan mengalami hambatan kedepannya. Hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya eksistensi Israel di wilayah Timur Tengah, dan juga melemahnya legitimasi Palestina akibat tekanan yang diterima pasca keputusan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai wilayah Israel.

